

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Kerentanan buruh migran perempuan dari Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai konfigurasi struktur ekonomi, sosial, dan budaya yang membentuk kondisi dan dimensi-dimensi keterbatasan yang menjadi pendorong migrasi perempuan di Kabupaten Grobogan untuk bekerja di luar negeri. Hal tersebut berangkat dari sempitnya akses terhadap lapangan kerja di tingkat lokal bagi perempuan karena memiliki keterampilan dan pendidikan terbatas. Selain itu, sulitnya perempuan untuk mengakses sumber penghidupan yang layak di tingkat lokal juga disebabkan domestifikasi atau pelembagaan perempuan pada urusan domestik yang membuat mereka terjebak dalam kerja perawatan yang tidak dibayar. Hal tersebut membuat mereka memiliki daya tawar yang lemah jika disandingkan dengan kompetitor laki-laki perihal akses pekerjaan publik atau formal. Lebih lanjut, kondisi ini diinternalisasi secara sistemik hingga buruh migran perempuan merasa tidak layak untuk berpartisipasi dalam ruang-ruang keputusan strategis. Hal ini tercermin dari rasa inferior yang muncul ketika ada rapat desa seperti Musrembang atau PKK. Kerentanan buruh migran perempuan tidak terjadi di wilayah asal mereka saja, tetapi juga berlanjut ketika mereka bekerja di luar negeri. Biaya upah mereka ditekan sedemikian rupa, mulai dari pengabaian perjanjian dalam kontrak kerja, potongan biaya penyalur yang tidak proporsional, hingga beban kerja

yang berlebih dan tidak sebanding dengan upah. Selain itu, relasi kuasa yang timpang antara buruh migran perempuan, penyalur, dan pemberi kerja menyebabkan terjadinya eksploitasi lanjutan, mulai dari diskriminasi identitas berupa kepercayaan dan kewarganegaraan yang mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap buruh migran perempuan serta ancaman kekerasan dari pemberi kerja akibat rancunya batas ruang kerja dan ruang privat dalam konteks kerja perawatan.

2. Peran LRC-KJHAM dalam merespon kerentanan yang dialami buruh migran perempuan dijalankan melalui tiga strategi utama. Yang pertama ialah upaya penciptaan intelektual organik berbasis komunitas dengan kegiatan berupa diskusi rutin yang memungkinkan terpantiknya kesadaran kritis buruh migran perempuan terkait kondisi rentan mereka. Tidak hanya itu, upaya ini juga dilakukan melalui strategi riset partisipatif dengan melibatkan suara dan pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan utama dari riset tersebut. Riset ini merupakan upaya melahirkan pengetahuan kolektif yang dapat digunakan untuk mengadvokasikan pengalaman buruh migran perempuan ke pemerintah. Upaya yang kedua ialah penguatan keagensian buruh migran perempuan di ruang publik sebagai tindak lanjut dari upaya penyadaran kritis. Strategi ini dimanifestasikan dalam dua cara, yaitu pengorganisasian paralegal komunitas yang membangun kemandirian anggota komunitas dalam menangani kasus kekerasan di wilayah tempat tinggal. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan akibat kuatnya norma patriarkal

di wilayah desa. Selain itu, juga dilakukan penyaluran bantuan ekonomi bagi anggota komunitas buruh migran perempuan yang berdampak langsung pada kemandirian ekonomi mereka. Meskipun demikian, strategi ini sangat bergantung pada lembaga donor yang menjadikan LRC-KJHAM belum mampu menjalankan program ini secara berkelanjutan. Sedangkan strategi yang terakhir adalah advokasi sebagai kontrol sosial non-negara yang dilaksanakan dengan memberi fasilitas terhadap buruh migran perempuan dalam mengartikulasikan pengalaman mereka di ruang-ruang publik, termasuk bersama pemerintah. Hal ini juga menunjukkan bagaimana negara—melalui pemerintah daerah Kabupaten Grobogan—beroperasi di bawah kerangka kapitalisme yang memastikan patriarki tetap tumbuh subur untuk tetap mendorong ekonomi makro. Selain itu, pengalaman buruh migran perempuan juga diadvokasikan dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari riset partisipatif yang dilaksanakan LRC-KJHAM bersama anggota komunitas menunjukkan pendekatan reformis yang kurang menukil kondisi struktural arus migrasi tenaga kerja itu sendiri yang bergerak di bawah logika kapitalistik oleh pemerintah.

## 4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap buruh migran perempuan di Kabupaten Grobogan tahun 2023, maka dirumuskan saran sebagai berikut:

### 1. LRC-KJHAM

LRC-KJHAM perlu melampaui cita-cita reformis untuk dapat benar-benar mengkritik sistem yang mereproduksi kerentanan buruh migran perempuan asal Kabupaten Grobogan. Maka dari itu perlu dikembangkan strategi advokasi yang tidak hanya berorientasi pada perubahan kebijakan, tetapi juga pada upaya membongkar relasi ekonomi yang eksploitatif oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari sistem kapitalisme. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa ruang gerak LSM tetap berada dalam batas-batas sistem yang ada.

### 2. Pemerintah Kabupaten Grobogan

Dalam konteks ini, peran Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak dapat direduksi sebagai sekadar pelaksana kebijakan yang kurang optimal, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan tenaga kerja migran itu sendiri. Tingginya angka migrasi dari Kabupaten Grobogan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Grobogan beroperasi dalam kerangka yang secara struktural mendorong tersedianya tenaga kerja yang siap diserap dalam pasar kerja global, terutama pada sektor-sektor berupah rendah dan minim perlindungan. Dengan demikian, intervensi yang

dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Grobogan cenderung berfungsi untuk memastikan keberlanjutan pasokan tenaga kerja murah tersebut tanpa berupaya membongkar kondisi struktural yang mendorong migrasi itu sendiri.

### 3. Buruh Migran Perempuan Kabupaten Grobogan

Dalam konteks ini, buruh migran perempuan asal Kabupaten Grobogan tidak dapat dipersepsikan sebagai subjek dengan kebebasan dan kapasitas penuh untuk menghindari kerentanan yang mereka alami, mengingat pilihan untuk bermigrasi sendiri merupakan konsekuensi dari keterbatasan struktural. Dengan demikian, setiap upaya untuk meminimalkan kerentanan pada level individu hanya memiliki jangkauan yang terbatas. Maka dalam batas-batas tersebut, penguatan kapasitas kolektif di antara buruh migran perempuan—termasuk melalui pengorganisasian komunitas—menjadi upaya yang memungkinkan munculnya bentuk resistensi, meskipun tetap berada dalam tekanan yang memungkinkan cita-cita kebebasan dan kemandirian mereka terus dinegosiasikan di hadapan struktur yang lebih luas.